



Tata Kelola Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik di Indonesia

Penulis:

Afriyanni¹, Doni Hendrik²

Afiliasi:

Prodi Doktor Studi Kebijakan FISIP Universitas Andalas, Indonesia¹

FISIP Universitas Andalas, Indonesia²

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru, Indonesia¹

Email:

afriyannisubhan@gmail.com¹

doni@soc.unand.ac.id²



©2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

DOI : <https://doi.org/10.33701/jtpm.v5i2.5833>

*Penulis Korespondensi

Nama: Afriyanni

Afiliasi: Prodi Doktor Studi Kebijakan FISIP UNAND

Email: afriyannisubhan@gmail.com

Diterima: 08 Desember 2025

Direvisi: 16 Desember 2025

Publikasi Online: 18 Desember 2025

Abstract

Plastic waste issues in Indonesia continue to escalate in line with rapid urbanization, shifting consumption patterns, and weak waste governance capacity at the local government level. Although several national policy instruments have been introduced, their implementation at the local level remains suboptimal. This study aims to examine how local governments formulate and implement plastic waste management policies, identify institutional, social, economic, and political factors influencing implementation outcomes, and explore the role of multi-stakeholder collaboration. A scoping review was conducted using the PRISMA-ScR protocol to assess 35 eligible studies published between 2015 to 2025 retrieved from Scopus and Google Scholar. Thematic coding was applied to synthesize findings across research questions. The results indicate that implementation remains constrained by fragmented institutional coordination, limited financing, weak enforcement mechanisms, and low public participation. However, effective practices are observed in localities that apply collaborative governance approaches, integrate informal waste actors, and adopt circular economy models. The study concludes that improving policy effectiveness requires harmonizing national–local regulatory frameworks, strengthening institutional capacity, and institutionalizing multi-stakeholder collaboration supported by incentives and monitoring systems. These findings provide a consolidated knowledge base to inform future policy design and implementation strategies for plastic waste governance in Indonesia.

Keywords: policy governance, waste management, local government

Abstrak

Permasalahan sampah plastik di Indonesia semakin meningkat seiring dengan urbanisasi, pola konsumsi, dan lemahnya tata kelola pengelolaan limbah pada tingkat pemerintah daerah. Meskipun berbagai kebijakan nasional telah diterbitkan, implementasinya di tingkat lokal masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintah daerah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah plastik, mengidentifikasi faktor kelembagaan, sosial, ekonomi, dan politik yang

memengaruhi efektivitas implementasinya, serta menelaah peran kolaborasi multipihak. Scoping review dilakukan dengan mengikuti protokol PRISMA-Scr terhadap 35 artikel terpilih yang diterbitkan periode 2015-2025 dan diperoleh melalui Scopus, dan Google Scholar. Analisis dilakukan menggunakan *thematic coding* berdasarkan tiga pertanyaan penelitian. Hasil review menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah plastik di tingkat lokal masih terkendala koordinasi antarlembaga, keterbatasan pendanaan, lemahnya penegakan hukum dan rendahnya partisipasi masyarakat. Namun, praktik efektif ditemukan di daerah yang menerapkan tata kelola kolaboratif, mengintegrasikan sektor informal, dan mengadopsi model ekonomi sirkular. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan dapat ditingkatkan melalui harmonisasi kebijakan nasional-daerah, penguatan kapasitas institusi, serta pelembagaan kolaborasi multipihak yang didukung insentif dan mekanisme monitoring. Hasil ini memberikan dasar empiris dan konseptual untuk perumusan strategi kebijakan pengelolaan sampah plastik yang lebih adaptif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Tata kelola kebijakan, pengelolaan sampah plastik, pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah plastik menjadi salah satu permasalahan utama tata kelola perkotaan di Indonesia. Pertumbuhan penduduk, industrialisasi, serta perubahan gaya hidup konsumtif telah meningkatkan volume sampah plastik secara signifikan dalam satu dekade terakhir. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan bahwa sampah plastik menyumbang 7,26 ton atau 19,47 % dari total timbunan sampah nasional (37,31 juta ton) (Kementerian LHK, 2025). Kondisi ini tidak hanya menyebabkan penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga memicu pencemaran sungai dan laut, kerusakan ekosistem, potensi risiko serta kerugian sosial ekonomi akibat inefisiensi sistem pengelolaan sampah (Lestari & Trihadiningrum, 2019; Marnn et al., 2021; Okunola A et al., 2019).

Pemerintah pusat maupun daerah telah mengembangkan berbagai instrumen kebijakan mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 hingga kebijakan pembatasan plastik sekali pakai dan agenda ekonomi sirkular di tingkat daerah. Sejumlah daerah seperti Banjarmasin, Bali dan DKI Jakarta telah menjadi pelopor implementasi kebijakan pembatasan sampah plastik serta penguatan kelembagaan bank sampah (Bagastyo et al., 2023; Hendra & Arisanty, 2025; Sihalohe & Rusliadi, 2025). Meskipun demikian, hasil implementasi menunjukkan keragaman implementasi dan capaian keberhasilan yang signifikan antar daerah. Di satu sisi, beberapa daerah berhasil meningkatkan kepatuhan masyarakat dan menerapkan model tata kelola yang responsif namun di sisi lain, keterbatasan pendanaan, lemahnya koordinasi lintas lembaga dan minimnya partisipasi publik menyebabkan kebijakan ini tidak berjalan efektif.

Studi terdahulu menekankan bahwa efektivitas kebijakan pengelolaan sampah plastik tidak hanya dipegaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh dinamika kelembagaan, kapasitas implementasi, dukungan politik, keberlanjutan pendanaan, dan keterlibatan multi-aktor terutama sektor informal seperti pemulung dan jaringan bank sampah (Satispi & Aziz Samudra, 2022; Sihalohe & Rusliadi, 2025). Namun, sebagian besar penelitian masih bersifat parsial dan fragmentaris, karena lebih banyak berfokus pada studi kasus teknis (Kusmiyati et al., 2025), evaluasi program tunggal (Fitri, 2020; Willis et al., 2018), atau analisis perilaku masyarakat (Bagastyo et al., 2023; Northcoot, 2020). Hingga kini, masih terbatas penelitian yang secara sistematis memetakan bagaimana kebijakan pengelolaan sampah plastik dirumuskan, diimplementasikan, serta dinegosiasikan antar aktor dalam konteks tata kelola perkotaan Indonesia.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan scoping review untuk menjawab menyusun pemetaan pengetahuan (*knowledge mapping*) mengenai tata kelola dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah plastik pada level pemerintah di Indonesia. Secara

husus, penelitian ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana pemerintah daerah merumuskan dan menerapkan kebijakan pengelolaan sampah plastik dalam konteks tata kelola perkotaan; (2) faktor kelembagaan, sosial, ekonomi, dan politik apa yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tersebut; dan (3) bagaimana bentuk kolaborasi antar aktor pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan sektor informal dalam mendukung efektivitas kebijakan sampah plastik. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat dasar ilmiah dan praktis dalam mendorong transformasi pengelolaan sampah plastik menuju sistem yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi ekonomi sirkular.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan *scoping review* untuk memetakan temuan empiris dan konseptual mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah plastik di tingkat pemerintah daerah di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi bidang kajian yang masih berkembang dan membutuhkan pemetaan konseptual yang luas (Arksey & O'Malley, 2005). Proses *scoping review* dilakukan dengan mengacu pada pedoman metodologis Joanna Briggs Institute (JBI) dan mengikuti kerangka PRISMA-ScR (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analysis Extension for Scoping Review) dari (Tricco et al., 2018).

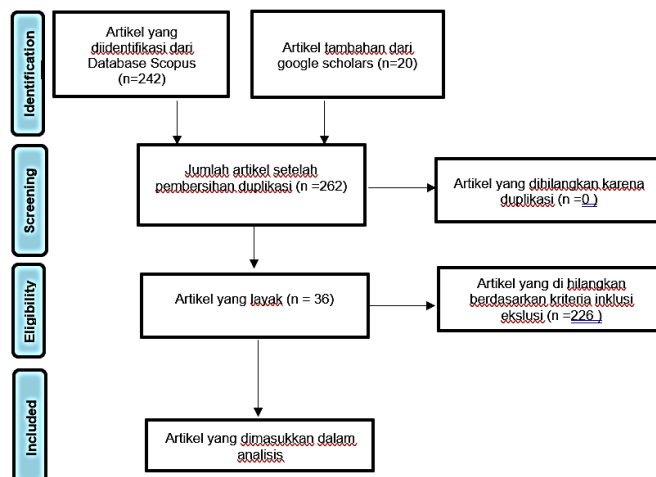
Kerangka penelitian disusun menggunakan pendekatan Population-Concept-Context (PCC). Population dalam studi ini adalah pemerintah daerah. Concept difokuskan pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah plastik, kapasitas tata kelola, dan dinamika aktor dalam pembentukan maupun pelaksanaan kebijakan. Context dibatasi pada wilayah Indonesia dalam kerangka desentralisasi pemerintahan. Kerangka PCC menjadi dasar dalam penyusunan pertanyaan penelitian, strategi pencarian data, serta kriteria seleksi artikel.

Pencarian literatur dilakukan pada Database Scopus dan Google Scholar sebagai basis data utama, ditambah dokumen kebijakan pemerintah berupa peraturan daerah dan laporan resmi yang relevan dengan konteks implementasi kebijakan persampahan di Indonesia. Pencarian dilakukan menggunakan kata kunci Boolean sebagai berikut (("plastic waste" OR "single-use plastic" OR "plastic pollution") AND ("local government" OR "municipality" OR "urban governance") AND ("policy" OR "regulation" OR "implementation" OR "governance") AND ("Indonesia")). Proses pencarian dibatasi pada publikasi rentang tahun 2015-2025 dalam bahasa Indonesia atau Inggris dan tersedia dalam bentuk full text.

Proses seleksi dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: penyaringan judul untuk menghapus studi yang tidak relevan, penyaringan abstrak berdasarkan kesesuaian fokus dengan pertanyaan penelitian dan pembacaan penuh untuk menentukan artikel final berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria eksklusi mencakup: (1) Artikel yang berfokus pada aspek teknis seperti karakteristik plastik, rekayasa material, uji laboratorium, atau inovasi teknologi tanpa kaitan eksplisit dengan kebijakan lokal; (2) Studi yang tidak berlokasi di Indonesia, hanya membahas kebijakan global atau nasional tanpa konteks pemerintah daerah, (3) Artikel yang memiliki duplikasi. Proses seleksi divisualisasikan melalui PRISMA *Flowchart* (lihat Gambar 1). Untuk meminimalkan bias seleksi, hasil *screening* diverifikasi ulang menggunakan *cross checking* berbasis kriteria inklusi dan eksklusi.

Data diekstraksi dan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik (*thematic synthesis*). Setiap artikel yang lolos seleksi dikodekan melalui tiga tahap, yaitu open coding untuk mengidentifikasi konsep dan variabel utama, axial coding untuk mengelompokkan kode ke dalam kategori berdasarkan pertanyaan penelitian, *selective coding* untuk menghasilkan sintesis tematik yang menjelaskan pola hubungan antar aktor, konteks kebijakan dan dinamika implementasi dalam bentuk matriks analitis.

Gambar 1 Diagram Prisma Penelitian



Tabel 1 Matriks Analisis Tematik

No.	Tema	Artikel yang Merepresentasikan Tema	Temuan Inti (Key Findings)
1.	Bagaimana pemerintah daerah merumuskan dan menerapkan kebijakan pengelolaan sampah plastik?	(Fariz et al., 2024; Fitri, 2020; Kamaruddin et al., 2022; Puspitawati et al., 2025; Ratnasari et al., 2023; Sabarna & Ramdani, 2025; Sulistiawati, 2022; Zahrah et al., 2024)	Perumusan kebijakan masih bersifat <i>top-down</i> , dengan ketergantungan pada kerangka regulasi nasional tanpa adaptasi konteks lokal. Implementasi menunjukkan variasi antar daerah bergantung pada kapasitas kelembagaan, kesiapan fiskal, dan mekanisme penegakan hukum. Daerah yang mengkombinasikan regulasi, insentif, dan pelibatan masyarakat menunjukkan capaian implementasi lebih baik dibanding hanya menerapkan pelarangan administratif.
2.	Faktor kelembagaan, sosial, ekonomi, dan politik apa yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi?	(Astuti, 2022; Bagastyo et al., 2023; Dwicahyani et al., 2020; Ginting & Tambunan, 2024; Haryono, 2019; Hasan, 2021; Hendra & Arisanty, 2025; Kader et al., 2021; Lupiyanto et al., 2024; Mahardika & Pratamo, 2024; Maulana et al., 2025; Narto & Suparno, 2020; Phelan et al., 2020; Prasetyo et al., 2024; Resosudarmo, 2012; Restanti & Mirwan, 2023, 2023; Solihin et al., 2019; Subekti, 2023; Widhiasthini et al., 2024; Yulianti, 2024; Zainuri & Agasty, 2023)	Efektivitas implementasi dipengaruhi oleh: (a) kapasitas kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor, (b) iliterasi dan perilaku masyarakat, (c) iinsentif ekonomi dan pasar daur ulang, serta (d) komitmen dan dukungan politik. Hambatan utama mencakup tumpang tindih kewenangan, lemahnya penegakan hukum, resistensi industri plastik, serta terbatasnya pendanaan dan infrastruktur pendukung.

No.	Tema	Artikel yang Merepresentasikan Tema	Temuan Inti (Key Findings)
3.	Bagaimana kolaborasi pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan sektor informal mendukung efektivitas kebijakan?	(Hendra & Arisanty, 2025; Kamaruddin et al., 2022; Maskun et al., 2023; Prasetyo et al., 2024; Puluhulawa et al., 2022; Rahdriawan, 2013, 2013; Sabarna & Ramdani, 2025; Sihaloho & Rusliadi, 2025; Sulistiawati, 2022)	Model tata kelola kolaboratif menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan efektivitas implementasi kebijakan, terutama ketika terdapat: insentif kelembagaan, mekanisme koordinasi yang jelas, partisipasi masyarakat, dan integrasi sektor informal dalam rantai pengelolaan sampah. Namun, praktik kolaborasi masih belum merata dan sering tergantung pada kepemimpinan lokal serta inisiatif program bukan desain institusional yang sistematis.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti Tahun 2025, data diolah

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Perumusan dan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik oleh Pemerintah Daerah (RQ1)*

Hasil scoping review menunjukkan bahwa perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah plastik di tingkat pemerintah daerah di Indonesia masih menunjukkan sangat bervariasi. Variasi ini terlihat pada pemilihan instrumen kebijakan, kualitas peraturan daerah serta kesiapan kelembagaan dalam menjalankan kebijakan secara berkesinambungan. Perbedaan kapasitas kelembagaan dan konteks lokal menghasilkan tingkat efektivitas implementasi yang tidak merata antarwilayah.

Pada tingkat nasional, Pemerintah Indonesia telah menetapkan komitmen pengurangan pengurangan sampah plastik melalui Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019. Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti oleh beberapa daerah melalui penetapan regulasi pembatasan plastik sekali pakai. Hingga tahun 2023 terdapat 113 pemerintah daerah yang telah menetapkan regulasi terkait pembatasan plastik sekali pakai (Forum Daerah Bebas Plastik, 2023). Peraturan daerah tersebut, umumnya mengacu pada kerangka hukum nasional, seperti Undang-undang Nomor 18 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2012, dan Perpres 97 Tahun 2017 (Kamaruddin et al., 2022; Ratnasari et al., 2023; Sulistiawati, 2022). Seiring perkembangan, beberapa daerah mulai menerapkan beberapa instrumen terkait dengan mekanisme penanganan sampah, misalnya pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah oleh pihak ketiga dan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap tempat pengolahan akhir (Maskun et al., 2023). Regulasi terkait penanganan sampah palastik dapat dilihat pada Tabel 2.

Namun demikian, proses penerjemahan regulasi nasional ke tingkat daerah belum sepenuhnya memperhatikan konteks sosial-lingkungan setempat, kapasitas fiskal daerah, serta kesiapan aktor pelaksana. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi faktual, terutama dalam hal penegakan hukum, pengawasan, dan sistem evaluasi kinerja (Fariz et al., 2024). Pada sebagian besar daerah, pendekatan implementasi masih bersifat administratif, seperti pelarangan penggunaan plastik sekali pakai dan himbauan perubahan perilaku. Sebaliknya daerah seperti Surabaya, Bali dan Yogyakarta menunjukkan kemajuan melalui kombinasi kebijakan berbasis insentif, pendekatan partisipatif, dan penguatan bank sampah sebagai model pengelolaan berbasis masyarakat (Sabarna & Ramdani, 2025).

Selain pendekatan formal, beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Surabaya menggunakan pendekatan non formal melalui kampanye budaya penggunaan botol minum ulang, kantong belanja ramah lingkungan, dan program edukasi lingkungan (Karjoko et al., 2022). Walaupun strategi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran publik, perubahan perilaku yang dihasilkan belum cukup untuk menjawab persoalan struktural pengelolaan sampah plastik secara menyeluruh.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam implementasi kebijakan penanganan sampah plastik terletak pada lemahnya harmonisasi regulasi, koordinasi lintas sektor, serta alokasi pendanaan yang belum memadai (Fitri, 2020). Maskun et al., (2023) menyoroti bahwa keberadaan Perpres 83/2018 dan Rencana Aksi Nasional (NAP) menunjukkan komitmen awal pemerintah, namun hambatan seperti ego sektoral, koordinasi antarlembaga yang lemah, dan minimnya alokasi anggaran menghambat efektivitas kebijakan. Kondisi serupa ditemukan pada konteks Malaysia dan Indonesia, di mana kerangka teknis dan hukum masih belum sepenuhnya mendukung pengelolaan sampah plastik secara komprehensif (Kamaruddin et al., 2022).

Tabel 2 Kerangka Regulasi Sampah Plastik

Regulasi	Tujuan Utama	Isi/Substansi Kunci	Catatan Implementasi
UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Menjadi dasar hukum nasional pengelolaan sampah	Dua pendekatan: Pengurangan (Reduce, Reuse, Recycle) dan Penanganan (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Pemrosesan Akhir)	Menjadi regulasi induk seluruh kebijakan turunan; implementasi masih berorientasi hilir di banyak daerah
PP No. 81 Tahun 2012 & PP No. 27 Tahun 2020	Menjabarkan pedoman teknis UU 18/2008	Standar teknis operasional pengelolaan sampah termasuk kelembagaan dan peran pemerintah daerah	Memperjelas mekanisme pelaksanaan, namun masih lemah pada aspek pengawasan
Perpres No. 97 Tahun 2017 (Jakstranas)	Menerapkan target nasional pengurangan dan penanganan sampah	Target 30% pengurangan dan 70% penanganan sampah	Standar nasional untuk penyusunan <i>Jakstrada</i> ; implementasi daerah bervariasi
Permen LHK No. 75 Tahun 2019	Memberlakukan skema Extended Producer Responsibility (EPR)	Produsen wajib menarik kembali kemasan, menyediakan fasilitas pengumpulan, serta melapor kinerja	Instrumen paling progresif tetapi tantangan muncul pada pengawasan, database produsen, dan kepatuhan industry
Perpres No. 83 Tahun 2018 (Rencana Aksi Nasional Sampah Laut)	Mengurangi sampah plastik laut	5 strategi: edukasi, pengelolaan darat & pesisir, penegakan hukum, pendanaan, serta riset dan inovasi	Lebih fokus hilir; membutuhkan koordinasi lintas instansi dan kerja sama internasional
Peraturan Daerah (Provinsi/Kota)	Pembatasan atau pelarangan plastik sekali pakai	Larangan kantong plastik, promosi alternatif, insentif dan sanksi	Implementasi bergantung pada kapasitas fiskal, dukungan politik lokal, dan respon pelaku usaha

Sumber :(Fariz et al., 2024; Kamaruddin et al., 2022; Maskun et al., 2023; Puspitawati et al., 2025)

Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi belum menjadi jaminan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah plastik di tingkat daerah. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kombinasi instrumen regulasi yang tepat, kapasitas kelembagaan, dukungan politik, serta penerimaan dan partisipasi masyarakat. Fakta bahwa lebih dari 70% sampah perkotaan masih berakhir di TPA dengan mekanisme *open dumping* menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi belum bersifat sistemik (Maskun et al., 2023; Zahrah et al., 2024). Oleh karena itu diperlukan harmonisasi kebijakan dan strategi implementasi antarlevel pemerintahan serta penguatan tata kelola yang mendukung mekanisme berbasis kinerja agar kebijakan pengelolaan sampah plastik tidak sekedar berhenti pada dokumen regulatif, tetapi terukur dalam praktik.

3.2 Faktor Kelembagaan, Sosial, Ekonomi, dan Politik yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik

Hasil scoping review menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah plastik di tingkat pemerintah daerah dipengaruhi oleh interaksi kelembagaan, sosial, ekonomi, dan politik. Faktor kelembagaan merupakan temuan dominan dalam literatur. Meskipun kerangka kebijakan telah tersedia, banyak pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia terlatih, lemahnya sistem manajemen operasional, dan ketiadaan unit teknis khusus yang menangani pengelolaan sampah secara terintegrasi sehingga implementasi kebijakan berjalan parsial, tidak konsisten, dan sering bergantung pada inisiatif komunitas atau proyek tertentu seperti bank sampah dan TPS3R (Dwichehyani et al., 2020; Restanti & Mirwan, 2023; Solihin et al., 2019). Tantangan kelembagaan semakin diperburuk dengan lemahnya koordinasi lintas sektor. Ketidakjelasan pembagian peran antar instansi dan minimnya mekanisme kolaborasi formal mengakibatkan tumpang tindih kewenangan, implementasi kebijakan yang tidak sinkron, serta rendahnya akuntabilitas. Sebaliknya, daerah yang menerapkan tata kelola kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan pelaku informal menunjukkan implementasi yang lebih konsisten dan berkelanjutan (Lupiyanto et al., 2024; Zainuri & Agastya, 2023).

Dimensi sosial dalam implementasi kebijakan penanganan sampah plastik, terkait dengan partisipasi masyarakat. Hasil studi Prasetyo et al., (2024), menemukan bahwa meskipun tingkat kesadaran publik terhadap isu sampah plastik terus meningkat, terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan praktik yang tercermin pada rendahnya tingkat pemilahan sampah rumah tangga dan adopsi alternatif produk ramah lingkungan. Selain itu beberapa studi lainnya menunjukkan bahwa perubahan perilaku tidak dapat dicapai melalui edukasi semata, melainkan memerlukan kombinasi instrumen sosial berupa kampanye berkelanjutan, penyediaan fasilitas pendukung, mekanisme insentif, serta penerapan sanksi yang proporsional (Bagastyo et al., 2023; Maulana et al., 2025). Studi Phelan et al., (2020) dan (Yulianti, 2024) menyimpulkan bahwa program berbasis komunitas seperti bank sampah terbukti mampu meningkatkan partisipasi sekaligus memperkuat modal sosial dalam tata kelola sampah plastik.

Selain faktor budaya dan perilaku, dimensi sosial-ekonomi turut menentukan keberlanjutan pengelolaan sampah plastik. Ketika pengelolaan sampah menghadirkan nilai ekonomi misalnya melalui produksi paving block atau praktik ekonomi sirkular berbasis bank sampah partisipasi masyarakat meningkat karena aktivitas tersebut tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga menghasilkan manfaat finansial (Astuti, 2022; Kader et al., 2021). Namun, ketimpangan akses terhadap informasi, pelatihan, dan fasilitas pengelolaan sampah tetap menjadi hambatan utama dalam penerapan kebijakan di berbagai daerah. Program pelatihan berbasis CSR dan penyuluhan publik terbukti mampu meningkatkan literasi lingkungan dan partisipasi warga dalam pengurangan sampah plastik (Narto & Suparno, 2020). Hal ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah plastik sangat bergantung pada kemampuannya memperkuat kesadaran kolektif, menyediakan insentif sosial-ekonomi, dan memfasilitasi perilaku ramah lingkungan secara berkelanjutan.

Faktor ekonomi juga memegang peranan penting, khususnya terkait biaya operasional, keberlanjutan pasar daur ulang, dan keterjangkauan material alternatif. Tingginya biaya pengumpulan, pemilahan, dan pemrosesan sampah plastik menjadi hambatan utama bagi pemerintah daerah dalam menyediakan sistem pengelolaan yang efektif dan mandiri (Hendra & Arisanty, 2025). Namun, ketika kebijakan pengelolaan sampah menghasilkan manfaat ekonomi melalui praktik ekonomi sirkular seperti *eco-products* dan sistem insentif bank sampah, partisipasi masyarakat meningkat secara signifikan (Astuti, 2022; Kader et al., 2021). Instrumen fiskal seperti cukai plastik dan skema tanggung jawab produsen diperluas dinilai berpotensi memperkuat tata kelola, meskipun implementasinya memerlukan harmonisasi lintas kementerian dan dukungan

politik yang stabil (Ginting & Tambunan, 2024; Hasan, 2021; Ratnasari et al., 2023). Investasi pada industri alternatif ramah lingkungan dan dukungan transisi bagi sektor informal dinilai dapat memperkuat ekonomi sirkular dan meningkatkan keberlanjutan tata kelola (Mahardika & Pratamo, 2024; Subekti, 2023). Sejalan dengan Mahardika & Pratamo, (2024) dan Subekti, (2023), studi Ratnasari et al., (2023) menunjukkan perlunya pergeseran paradigma kebijakan dari system linear menuju model ekonomi sirkuler.

Terakhir, dukungan politik yang kuat dari pimpinan daerah dan legislatif menjadi faktor penting dalam memastikan konsistensi implementasi dan ketersediaan sumber daya. Studi Resosudarmo, (2012).menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan cenderung tidak berkelanjutan tanpa kepemimpinan politik yang visioner dan konsisten. Selain itu, pelibatan aktor kunci sejak tahap perumusan kebijakan diperlukan untuk mengurangi resistensi serta meningkatkan legitimasi implementasi di tingkat masyarakat (Haryono, 2019; Widhiasthini et al., 2024). Oleh karena itu efektivitas kebijakan pengelolaan sampah plastik tidak hanya dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan sebagai masalah tata kelola multi-level yang dipengaruhi struktur kekuasaan, insentif, serta dinamika sosial-ekologi di tingkat lokal.

3.3 Peran Kolaborasi Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, Masyarakat Sipil, dan Sektor Informal dalam Efektivitas Kebijakan Sampah Plastik

Kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan pilar penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah plastik di tingkat lokal di Indonesia. Sebagai salah satu negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia, pengelolaan sampah plastik tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral atau regulasi tunggal, melainkan memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan sektor informal untuk mewujudkan tata kelola pengelolaan sampah plastik yang inklusif, responsif dan berorientasi ekonomi sirkular yang berkelanjutan (Prasetyo et al., 2024).

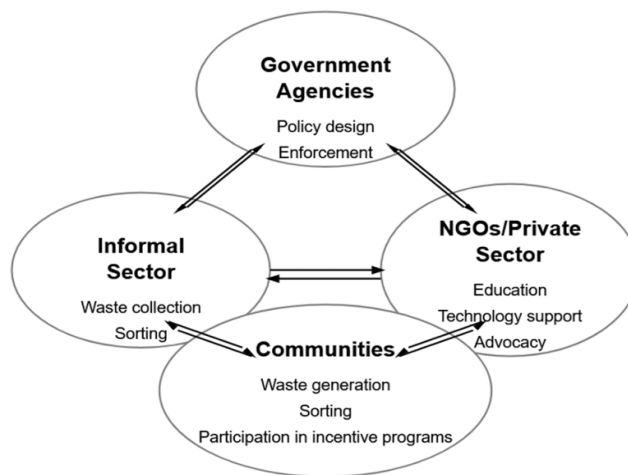
Pemerintah daerah memiliki peran utama sebagai pembuat kebijakan sekaligus pengarah strategi implementasi. Tanggung jawab pemerintah mencakup penyusunan regulasi, penyediaan infrastruktur dasar, serta alokasi anggaran yang mendukung operasional kebijakan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa regulasi yang didukung oleh pedoman teknis yang jelas, insentif, serta penegakan hukum yang konsisten lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku dan memperkuat sistem pengelolaan sampah plastik (Rahdriawan, 2013). Namun, banyak daerah masih mengandalkan pendekatan top-down tanpa melibatkan aktor lokal secara memadai, sehingga implementasi kebijakan berjalan tidak optimal (Hendra & Arisanty, 2025).

Sektor swasta berperan penting dalam penyediaan teknologi ramah lingkungan, pembiayaan program daur ulang, dan penerapan prinsip Extended Producer Responsibility (EPR). Inisiatif yang melibatkan industri menunjukkan dampak yang signifikan dalam pengurangan volume sampah plastik dan kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon. Walaupun demikian, sebagian besar kontribusi tersebut masih bersifat sukarela, sehingga keberlanjutan peran sektor swasta sangat dipengaruhi oleh adanya insentif ekonomi, kepastian pasar daur ulang, serta mekanisme regulasi yang konsisten (Kamaruddin et al., 2022).

Selanjutnya, masyarakat sipil dan sektor informal memiliki kontribusi penting dalam mendorong kesadaran publik dan memperkuat implementasi di tingkat akar rumput. Organisasi masyarakat sipil berperan dalam edukasi, advokasi, dan pendampingan komunitas, sedangkan sektor informal terutama pemulung dan pengepul memiliki fungsi vital dalam rantai pemulihan plastik karena mereka berada pada titik awal proses pemilahan dan pengumpulan material (Rahdriawan, 2013; Sulistiawati, 2022). Pendekatan kebijakan yang mengakui, melindungi, dan mengintegrasikan peran sektor informal, misalnya melalui skema insentif, pelatihan, dan registrasi formal, terbukti meningkatkan efektivitas pemilahan sampah dan memperkuat keberlanjutan

sistem(Sihaloho & Rusliadi, 2025). Gambaran tentang tata kelola kolaboratif antar aktor dapat dilihat pada Gambar 1.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan fasilitatif, kejelasan peran antar-aktor, serta adanya insentif dan mekanisme koordinasi yang berkelanjutan. Hal ini diperkuat oleh studi (Sabarna & Ramdani, 2025) menunjukkan bahwa insentif finansial, dukungan sumber daya, dan mekanisme berbagi peran memperkuat interdependensi aktor serta efektivitas koordinasi dalam tata kelola kolaboratif. Namun, hambatan struktural seperti ego sektoral, lemahnya mekanisme monitoring, perbedaan budaya hukum, dan rendahnya kesadaran publik masih membatasi praktik kolaboratif di berbagai daerah (Maskun et al., 2023; Puluhulawa et al., 2022).



Gambar 2 Tata Kelola Kolaboratif Sampah Plastik

Sumber: (Sihaloho & Rusliadi, 2025)

KESIMPULAN

Hasil scoping review ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah plastik di tingkat pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural, meskipun kerangka regulasi nasional telah tersedia. Kebijakan belum berjalan optimal karena terdapat kesenjangan antara desain kebijakan dan kemampuan implementasi di tingkat lokal. Efektivitas implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu kelembagaan, sosial, ekonomi, dan politik. Keterbatasan kapasitas teknis pemerintah daerah, lemahnya koordinasi lintas sektor, belum konsistennya penegakan hukum, rendahnya perubahan perilaku masyarakat, serta terbatasnya insentif ekonomi menjadi hambatan utama. Selain itu, keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh komitmen politik, kesinambungan kebijakan, serta dukungan legislatif yang berperan dalam alokasi anggaran dan prioritas kebijakan.

Temuan kajian ini juga menegaskan pentingnya tata kelola kolaboratif dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah plastik. Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan sektor informal terbukti dapat memperkuat kapasitas sistem, memperluas partisipasi publik, serta mendorong penerapan praktik ekonomi sirkular. Namun, praktik kolaborasi tersebut masih belum berjalan optimal akibat minimnya mekanisme koordinasi, insentif kelembagaan, dan belum terintegrasinya sektor informal dalam sistem resmi pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan melalui harmonisasi kebijakan nasional dan daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, penerapan instrumen ekonomi seperti extended producer responsibility, serta pengembangan ekosistem kolaboratif yang responsif terhadap konteks lokal agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian artikel ini.

REFERENSI

- Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: Towards a methodological framework. *International Journal of Social Research Methodology*, 8(1), 19–32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>
- Astuti, H. K. (2022). *Pemberdayaan Ekonomi Kreatif melalui Daur Ulang Sampah Plastik (Studi Kasus Bank Sampah Kelurahan Paju Ponorogo)*. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6j7rv>
- Bagastyo, A. Y., Anggrainy, A. D., & Maharani Wiguna Hidayat Liang, M. S. (2023). Assessment of attitude and participation level among the households and local merchants toward single-use plastic waste management: A case study in Balikpapan Municipality, Indonesia. *Case Studies in Chemical and Environmental Engineering*, 7, 100361. <https://doi.org/10.1016/j.cscee.2023.100361>
- Dwicahtyani, A. R., Novianarenti, E., Radityaningrum, A. D., & Ningsih, E. (2020). Identifikasi Kendala dan Rumusan Strategi Pengelolaan Bank Sampah di Simojawar, Surabaya. *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)*, 4(2), 49–58. <https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2020.v4i2.1090>
- Fariz, R. D. A., Muis, R., Anggraini, N., Rachman, I., & Matsumoto, T. (2024). Good Environmental Governance Roles in Sustainable Solid Waste Management in Indonesia: A Review. *Journal of Community Based Environmental Engineering and Management*, 8(8), 45–56. <https://doi.org/10.23969/jcbeem.v8i1.12035>
- Fitri, S. E. (2020). Dinamika, Problematika, dan Implikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik (Studi Kasus Kota Bogor dan Kota Bekasi). *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1 Juni), 11–24.
- Forum Daerah Bebas Plastik. (2023). *Press Release: Diet Plastik Indonesi*.
- Ginting, I. F., & Tambunan, M. R. U. D. (2024). Institutional Challenges and Continuous Pending on Levying Excise on the Use of Plastics in Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(6), 1513–1525. <https://doi.org/10.14710/jil.22.6.1513-1525>
- Haryono, E. (2019). Economic Diplomacy as Indonesian Foreign Policy Orientation in 2015-2018: Challenges and Opportunities. *Jurnal Global & Strategis*, 13(2), 46. <https://doi.org/10.20473/jgs.13.2.2019.46-61>
- Hasan, D. (2021). Indonesia: Paid Plastic Bag Policy: Its Concept and Relevance to Pollution-Levy Principles. *Environmental Policy and Law*, 50(4–5), 415–422. <https://doi.org/10.3233/EPL-200244>
- Hendra, H., & Arisanty, D. (2025). Political Ecology Evaluation of Waste Management Policy in Banjarmasin City. *Asian Journal of Environmental Research*, 2(2), 127–135. <https://doi.org/10.69930/ajer.v2i2.368>
- Kader, M. A., Herlina, E., & Setianingsih, W. (2021). Pengelolaan Sampah Plastik menjadi Paving Block sebagai Prospek Bisnis pada Masyarakat Pra Sejahtera. *Abdimas Galuh*, 3(1), 102. <https://doi.org/10.25157/ag.v3i1.5026>
- Kamaruddin, H., Maskun, Patittingi, F., Assidiq, H., Bachril, S. N., & Al Mukarramah, N. H. (2022). Legal Aspect of Plastic Waste Management in Indonesia and Malaysia: Addressing Marine Plastic Debris. *Sustainability*, 14(12), 6985. <https://doi.org/10.3390/su14126985>
- Karjoko, L., Handayani, I. G. A. K. R., Jaelani, A. K., & Hayat, M. J. (2022). Indonesia's Sustainable Development Goals Resolving Waste Problem: Informal to Formal Policy. *International*

- Journal of Sustainable Development and Planning*, 17(2), 649–658.
<https://doi.org/10.18280/ijstdp.170230>
- Kementerian LHK. (2025). *Komposisi Sampah 2024*. SIPSN.
<https://sipsn.kemenvlh.go.id/sipsn/public/data/komposisi>
- Kusmiyati, Hasan., & Isworo, S. (2025). Opportunities and Challenges in Plastic Waste Management Strategies in Boyolali, Indonesia. *Nature Environment and Pollution Technology*, 24(3), D1732. <https://doi.org/10.46488/NEPT.2025.v24i03.D1732>
- Lestari, P., & Trihadiningrum, Y. (2019). The impact of improper solid waste management to plastic pollution in Indonesian coast and marine environment. *Marine Pollution Bulletin*, 149, 110505. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.110505>
- Lupiyanto, R., Nurhasanah, N., & Hamzah, H. P. (2024). Strategi Perbaikan Kinerja Pengelolaan Lingkungan untuk Keberlanjutan TPS-3R Perkotaan (Studi Kasus di TPS-3R Kenanga, Kabupaten Sleman, DIY). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(5), 1135–1142. <https://doi.org/10.14710/jil.22.5.1135-1142>
- Mahardika, S., & Pratomo, N. B. A. (2024). The Problem of Plastic Waste, A Comparison of the Systems in Indonesia and the Netherlands: The Urgency of State Intervention and Legal Instruments. *Environmental Pollution Journal*, 4(1), 934–949. <https://doi.org/10.58954/epj.v4i1.172>
- Marnn, P., Claude, N. J., Al-Shaibah, B., Htoo, H., Al-Masnay, Y. A., Ali, H., Win, T. Z., Al-Aizari, A. R., Sethi, H., Khan, W. A., & Malik, I. (2021). Plastic Pollution: Issues Pertaining to Developing Countries in Asia. *American Journal of Environment and Sustainable Development*, 6(1), 15–25.
- Maskun, M., Kamaruddin, H., Pattitingi, F., Assidiq, H., Bachril, S. N., & Al Mukarramah, N. H. (2023). Plastic Waste Management in Indonesia: Current Legal Approaches and Future Perspectives. *Hasanuddin Law Review*, 9(1), 106. <https://doi.org/10.20956/halrev.v9i1.3683>
- Maulana, D., Nugroho, C., Wulan, R. R., & Habibi, F. (2025). Developing Sustainable Waste Management in Urban Areas: Case Study of Municipal Government Policy Strategies in Banten Indonesia. *SAGE Open*, 15(3), 21582440251378799. <https://doi.org/10.1177/21582440251378799>
- Narto, S., & Suparno, B. A. (2020). Evaluasi Program Corporate Social Responsibility Pelatihan Ecobrick dalam Mengelola Sampah Plastik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(3), 295. <https://doi.org/10.31315/jik.v17i3.3778>
- Northcoot, M. S. (2020). Rubbish, Recycling and Religion: Indonesia's Plastic Waste Crisis and the Case of Rumah Kompos in Ubud, Bali. *International Journal of Interreligious and Intercultural Studies*, 3(1), 1–19. <https://doi.org/10.32795/ijis.vol3.iss1.2020.680>
- Okunola A, A., Kehinde I, O., Oluwaseun, A., & Olufiropo E, A. (2019). Public and Environmental Health Effects of Plastic Wastes Disposal: A Review. *Journal of Toxicology and Risk Assessment*, 5(2). <https://doi.org/10.23937/2572-4061.1510021>
- Phelan, A. (Any), Ross, H., Setianto, N. A., Fielding, K., & Pradipta, L. (2020). Ocean plastic crisis—Mental models of plastic pollution from remote Indonesian coastal communities. *PLOS ONE*, 15(7), e0236149. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236149>
- Prasetyo, Y. E., Setiawan, B., Alam, R. H., Seftiani, S., Datau, T. I., Butolo, I., & Biahimo, S. D. J. (2024). Plastic Waste Management: Opportunities and Challenges in Implementing Circular Economy in Gorontalo. *Proceeding of the International Conference on Multidisciplinary Research for Sustainable Innovation*, 1, 65–72. <https://doi.org/10.31098/icmrsi.v1i.784>
- Puluhulawa, F., Rusdiyanto Puluhulawa, M., & Adelina Harun, A. (2022). Legal Culture of Local Community in Plastic Waste Management. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12089>

- Puspitawati, D., Susanto, F. A., Kurniaty, R., Kurniawan, A., Nursasmita, M. A., & Mohd Rusli, M. H. (2025). Regulatory and Institutional Approach in Tackling Marine Plastic Pollution: The Practice of Indonesia. *Jurnal Suara Hukum*, 7(1), 23–67. <https://doi.org/10.26740/jsh.v7n1.p23-67>
- Rahdriawan, M. (2013). Sektor Informal dan Pengautan Kelembagaan okal dalam Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat di Desa Kutoharjo Kabuapten Kendal. *Jurnal Pengembangan Kota*, 1(1), 32. <https://doi.org/10.14710/jpk.1.1.32-42>
- Ratnasari, S., Mizuno, K., Herdiansyah, H., & Simanjutak, E. G. H. (2023). Enhancing Sustainability Development for Waste Management through National–Local Policy Dynamics. *Sustainability*, 15(8), 6560. <https://doi.org/10.3390/su15086560>
- Resosudarmo, B. P. (2012). Implementing a national environmental policy: Understanding the ‘success’ of the 1989–1999 integrated pest management programme in Indonesia. *Singapore Journal of Tropical Geography*, 33(3), 365–380. <https://doi.org/10.1111/sjtg.12006>
- Restanti, R. B. A., & Mirwan, M. (2023). Pengolahan Sampah Plastik Menjadi Bahan Bakar Minyak Alternatif dengan Metode Pirolisis. *Jurnal Serambi Engineering*, 8(4). <https://doi.org/10.32672/jse.v8i4.6789>
- Sabarna, M. A. N., & Ramdani, R. (2025). Collaborative governance in waste management: A case study in the municipality of Yogyakarta, Indonesia. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 33–45. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v10i1.14408>
- Satispi, E., & Aziz Samudra, A. (2022). Study of Policy Implementation: Strategy of COVID-19 Plastic Waste Management in Indonesia. *Journal of Public Policy and Administration*, 6(4), 155. <https://doi.org/10.11648/j.jppa.20220604.11>
- Sihaloho, U. O., & Rusliadi, R. (2025). Collaborative Governance in Plastic Waste Recycling in Medan City: Integrating Informal Sector, Community Participation, and Policy. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 26–37.
- Solihin, M. M., -, P. M., & -, D. S. (2019). Partisipasi Ibu Rumah Tangga dalam Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah di Desa Ragajaya, Bojonggede-Bogor Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(3), 388. <https://doi.org/10.14710/jil.17.3.388-398>
- Subekti, R. (2023). A Circular Economy-Based Plastic Waste Management Policy in Indonesia (Compared to China and EU). *Yustisia Jurnal Hukum*, 12(2), 168. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v12i2.72177>
- Sulistiawati, L. Y. (2022). Challenges in marine plastic pollution regulation in Indonesia. *Asia Pacific Journal of Environmental Law*, 25(1), 100–118. <https://doi.org/10.4337/apjel.2022.01.05>
- Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O’Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., Moher, D., Peters, M. D. J., Horsley, T., Weeks, L., Hempel, S., Akl, E. A., Chang, C., McGowan, J., Stewart, L., Hartling, L., Aldcroft, A., Wilson, M. G., Garritty, C., ... Straus, S. E. (2018). PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. *Annals of Internal Medicine*, 169(7), 467–473. <https://doi.org/10.7326/M18-0850>
- Widhiasthini, N. W., Utami, M. S. M., & Subawa, N. S. (2024). Reform and Reformulation of Public Policy in Indonesia: What is required? *Journal of Government and Civil Society*, 8(2), 289. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v8i2.12361>
- Willis, K., Maureaud, C., Wilcox, C., & Hardesty, B. D. (2018). How successful are waste abatement campaigns and government policies at reducing plastic waste into the marine environment? *Marine Policy*, 96, 243–249. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.11.037>
- Yulianti, W. E. (2024). Legal Compliance and Environmental Sustainability: The Case of Single-Use Plastics in Bali. *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics*, 1(1), 31–38. <https://doi.org/10.63077/h1829z12>

- Zahrah, Y., Yu, J., & Liu, X. (2024). How Indonesia's Cities Are Grappling with Plastic Waste: An Integrated Approach towards Sustainable Plastic Waste Management. *Sustainability*, 16(10), 3921. <https://doi.org/10.3390/su16103921>
- Zainuri, A., & Agastya, A. A. R. (2023). Strategi Ecoton Dalam Penerapan Program Zero Waste Cities di Kecamatan Tempurejo Kota Kediri. *Environmental Pollution Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.58954/epj.v2i2.29>